

## MODAL - PENANAMAN - PENYELENGGARAAN

2025

PERDAPROV NTT NO. 3, LD 2025/NO.003 TLD NO.0136

## PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Abstrak : - Peran penting penanaman modal di daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi, maka untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah, penguatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan untuk memberikan dasar dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam bidang perizinan berusaha berbasis resiko perlu ditetapkan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di Daerah dengan menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, UU No. 24 Tahun 2019, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 7 Tahun 2021, PERPRES No. 16 Tahun 2012, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi, berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah, mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diatur tentang Perencanaan penanaman modal, Sasaran penanaman modal, Kewenangan pemerintah daerah, Kebijakan penanaman modal, Peta potensi penanaman modal, Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terintegrasi, Insentif dan kemudahan penanaman modal, Perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi dalam penyelenggaraan penanaman modal, Peran serta masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan dan pengawasan.

## Catatan

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025
- Persetujuan dan Izin Usaha Penanaman Modal yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, tidak berlaku.
- Penjelasan : 4 hlm

